



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
1. Menteri Keuangan RI;
2. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia;
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
Dengan : 4. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Asumsi Makro RAPBN Tahun 2020
Hadir Pemerintah : 1. MENTERI KEUANGAN RI/SRI MULYANI;
2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA/DESTRY DAMAYANTI;
3. MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS/;
4. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)/WIMBOH SANTOSO; dan
5. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)/SUHARIYANTO.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/F-PG):

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI serta Wakil Ketua yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat absensi telah ditandatangani oleh 21 Anggota yang terdiri dari 9 Fraksi, ijin 1 orang. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijinlah kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Badan Pusat Statistik. Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Mengawali Rapat Kerja kita pada sore hari ini marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami juga Komisi XI DPR RI mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Menteri, kemarin ya Ibu. Semoga Ibu tetap sehat dan menjalankan tugas dengan baik.

Agenda Rapat Kerja kita adalah pembahasan asumsi makro ekonomi dalam RAPBN tahun 2020. Sebagaimana diketahui pada tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan RUU APBN 2020 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna. Asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan dasar penyusunan RAPBN tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi 3,1% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Rp14.400,- suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan 5,4%. Sedangkan untuk target pembangunan adalah sebagai berikut. Angka kemiskinan 8,5% sampai 9%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8% sampai 5,1% dan tingkat kesenjangan gini ratio menjadi 0,375 sampai 0,380 dan indek pembangunan manusia menjadi 72,51.

Berdasarkan asumsi makro yang telah disebut di atas, Pemerintah telah menyusun postur APBN 2020 sebagai bagian dari pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.221,5 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.891,77 triliun dan PNBPNP Rp359,28 triliun serta pendapatan hibah sebesar Rp498,74 miliar.

Sedangkan total belanja negara direncanakan sebesar Rp2.528,77 triliun yang akan dialokasikan untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.669,98 triliun serta

anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,79 triliun. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja negara tersebut maka defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp307,225 triliun atau mencapai 1,76% dari PDB.

Oleh karena itu, kami berharap pada kesempatan ini Pemerintah dapat memberikan penjelasan kepada kami untuk kami dapat ketahui dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan beserta jajaran dan Menteri-menteri yang lain untuk menyampaikan pemaparannya.

Kami persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN RI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati juga seluruh jajaran dari Bapak Menteri Bappenas, Ketua DK OJK, Deputi Senior BI, Kepala BPS.

Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan mengenai landasan pemikiran proposal asumsi makro dan tentu tidak terlepas dari dinamika ekonomi yang sekarang ini sedang kita hadapi.

Pertama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan, bahwa Bapak Presiden telah menyampaikan pada tanggal 16 Agustus 2019, RUU RAPBN Tahun 2020 beserta nota keuangannya. Di dalam penyampaian Bapak Presiden, disampaikan asumsi-asumsi yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perhitungan termasuk proyeksi penerimaan negara dan belanja negara.

Untuk siang hari ini kita fokus untuk keempat asumsi yang dibahas di Komisi XI DPR RI. Pertama, mengenai pertumbuhan ekonomi.

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Seperti diketahui bahwa dinamika ekonomi global meningkat sangat drastis pada kuartal kedua dan terutama pada bulan Agustus ini. sebetulnya pembahasan mengenai proyeksi ekonomi makro untuk tahun 2020 yang menjadi landasan asumsi kami, kita sudah bahas dari mulai semenjak kuartal I. Dan semenjak kuartal I ini pertumbuhan ekonomi global terus menerus di revisi ke bawah untuk tahun 2019. Saat ini, proyeksi terakhir untuk *outlook* global adalah 3,2%. Ini jauh lebih rendah dari angka semula yang tadinya bahkan 3,7 dan 3,5 revisi 3,3 dan sekarang 3,2 di tahun 2019.

Penurunan ini adalah akibat ketidakpastian global dan *down side risk* yang sudah *materialize* atau yang sudah terjadi. Seperti biasa untuk IMF dalam menyampaikan proyeksi tentang global ekonomi outlook selalu menyampaikan

potensial resiko dari outlook tersebut. Salah satu yang sering disebutkan adalah mengenai ...(suara tidak jelas) Dan ketidak pastian dari sisi normalisasi akibat normalisasi dari kebijakan moneter di negara maju terutama Amerika Serikat.

Dan semenjak outlook itu disampaikan hingga dengan pertengahan 2019, semua disebut sebagai potensial *down side risk* atau resiko ke bawah dari outlook itu ternyata terjadi. Jadi dalam hal ini revisi dari outlook ekonomi global adalah diturunkan kebawah sebesar 0,5% lebih rendah. Ini kalau sesuai dengan GDP dari keseluruhan dari Initial project sampai sekarang berarti revisi 0,5% itu sama dengan ekonomi satu negara, yaitu South Africa. Penurunan dari pertumbuhan ekonomi dunia berarti kehilangan value sebesar ekonomi South Africa.

Dari sisi perdagangan global, juga dengan adanya tensi dan adanya retorika maupun korsi action yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan terutama dengan RRT meskipun dengan partner dagang yang lain juga meningkat. Telah menyebabkan perlambatan perdagangan internasional. Gross bahkan untuk tahun 2019 ini untuk perdagangan internasional adalah kedua terendah semenjak tahun 2012, yaitu sesudah tahun 2016 lalu 2,2 dan 2019 ini outlook untuk pertumbuhan perdangan global hanya 2,5%. Ini adalah pertumbuhan terendah kedua semenjak tahun 2012.

Ini menggambarkan bahwa kegiatan perdagangan internasional sudah terdampak oleh berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara terbesar, yaitu Amerika Serikat dan dibalas oleh negara kedua terbesar, yaitu RRT maupun negara-negara Eropa yang terdampak juga akibat adanya kebijakan *protectionist in world* ini.

Disisi lain dengan adanya pertumbuhan yang melemah dan perdagangan internasional yang melemah, maka seluruh indikator menunjukkan bahwa apabila tren ini berlanjut, maka tahun 2020 diperkirakan atau dikhawatirkan akan terjadi resesi terutama di negara-negara maju. Oleh karena itu, banyak respon *policy* yang dilakukan oleh *policy maker* terutama untuk kebijakan fiskal dan moneternya. Sekarang sudah memasukkan kekhawatiran mengenai pelemahan ekonomi global dan perdagangan global, bahkan kemungkinan terjadi resesi dengan melakukan apa yang disebut antisipasi *counter cyclical*. Jadi fiskal dan moneter dari para *policy maker* di negara-negara terutama yang sudah mengalami tren atau tanda-tanda mengalami pelemahan seperti di Jerman, di Eropa, negara-negara di Meksiko, Brasil, Argentina semuanya sudah masuk dalam pertumbuhan negative. Dan bahkan negara-negara Eropa yang *mature* dengan adanya tambahan ketidakpastian Brexit juga semakin menghadapi potensi penurunan proyeksi ekonomi.

Sehingga dari sisi kebijakan, baik fiskal maupun moneter diperkirakan akan menjadi lebih supportive dan ini diharapkan bisa menetralsir potensi terjadinya pelemahan yang berlanjut atau resesi. Sehingga kita ini sekarang dihadapkan pada kondisi di satu sisi seluruh tanda-tanda mengenai pelemahan global itu muncul, seperti indek manufactur global sudah turun di bawah 50 dan itu berarti sudah masuk bagian pesimis atau negative. Negara-negara di berbagai daerah semuanya tren ekonominya adalah melemah, seperti yang terlihat di atas ini Singapura sudah masuk zona negative. Uni Eropa, Jepang, India, Malaysia, Thailand, Philipina semuanya adalah trennya mengalami pelemahan.

Dan tadi saya sudah sampaikan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan dari perdagangan internasional global itu semuanya mengalami revisi ke bawah. Jadi di satu sisi kita berhadapan dengan seluruh tren yang menunjukkan arah pelemahan, di sisi lain respon *policy* baik fiskal dan moneter dari negara-negara tersebut yang kemudian melakukan *counter cyclical measure* kemungkinan bisa menimbulkan dampak yang positif, sehingga net dampak bersihnya di tahun 2020 masih sesuatu yang tidak pasti.

Inilah yang sebetulnya kita sedang hadapi untuk menetapkan asumsi makro 2020. Kalau kebijakan dari negara-negara tersebut terkoordinir dan sinergis serta koheren, maka kemungkinan bisa menyelematkan ekonomi dunia dari resesi sangat bisa terjadi. Ini terjadi seperti tahun 2008-2009 waktu *global financial crisis* yang memunculkan kekhawatiran terjadinya resesi dunia, seluruh negara G20 bersama-sama dalam satu nada, satu *direction* dan secara koheren mencoba menstimulasi ekonomi dan itu menyelamatkan ekonomi dunia dari depresi.

Seandainya ini terjadi lagi kemungkinan proyeksi resesi bisa saja dibalik. Namun, kalau kita melihat retorika dari *leaders* atau pemimpin-pemimpin di G7 maupun G20, G7 baru bertemu *weekend* di Perancis dan G20 pertemuan terakhir di Osaka. Kita mungkin mendapatkan sedikit gambaran bahwa *leaders* ini tidak sekompak dan searah waktu 2008-2009. Bahkan yang terjadi adalah saling untuk melakukan retorika yang bahkan menimbulkan ketidakpastian makin tinggi. Sehingga sampai dengan Agustus ini kalau kita lihat dari *global economic uncertainty index* bukannya semakin menurun tetapi malah terjadi *spike* yang semakin tinggi, biru yang diatas. Dan kalau kita lihat dari *fixed* dan *move index* yang semua adalah menggambarkan ketidakpastian *uncertainty* apakah ini di *stock market* ataukah di *bond* dan dari *policy making process* semuanya menggambarkan adanya tren yang meningkat terutama pada bulan Agustus ini. Eskalasi yang meningkat dan proyeksi adanya pelemahan ekonomi menyebabkan banyak para investor kemudian memburu kepada komoditas yang dianggap sebagai *save haven* dari nilai aset mereka seperti harga emas.

Inilah yang kita hadapi oleh Pemerintah karena kami tetap harus menyampaikan kepada Dewan RUU APBN pada tanggal 16 Agustus 2019 pada minggu-minggu menjelang 16 Agustus 2019 itu ketidakpastian makin memuncak. Waktu Presiden Trump melakukan tweet untuk menetapkan tarif tambahan yang kemudian direvisi dan kemudian direvisi lagi dan RRT melakukan balasan. Ini semuanya terjadi di dalam 3 minggu terakhir.

Meskipun kondisi tidak pasti secara global, namun posisi Indonesia sebetulnya dalam posisi yang relative lebih baik. Bahkan Indonesia bisa memosisikan berbeda dari negara-negara *emerging* yang lain. Tadi waktu saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi di saat banyak negara lain semuanya trennya merah ke bawah Indonesia relative stabil dalam 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan di atas 5. Itu tadi gambar halaman kedua.

Kalau kita lihat sekarang sesudah paska Pemilu 2019 di Indonesia, yaitu bulan Mei maka Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi dan stabil, dengan stabilitas inflasi yang terjaga dan kebijakan ekonomi kita yang dianggap

prudent dan mau melakukan langkah-langkah reformasi, ini menimbulkan *confident* terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sehingga kita mampu menarik capital inflow kembali kepada Indonesia. Kita lihat sesudah bulan Mei 2019 capital inflow untuk pasar surat berharga maupun dari sisi indek saham itu meningkat cukup tinggi. Dengan capital flow yang masuk ke Indonesia dibandingkan negara lain yang justru flat atau bahkan menurun, maka kita mampu menekan *yield curve* dari surat berharga negara kita.

Dari indikator konsumen pun dalam situasi yang tidak pasti ini *consumers confident* kita masih relative kuat dan stabil, jauh di atas 100 di *threshold*, yaitu di 125 dan relative stabil tinggi. Indek ekspektasi kondisi ekonomi kita juga masih di atas 135 bahkan relative mengalami peningkatan.

Inilah yang merupakan salah satu atau berbagai elemen yang mendasari kenapa Pemerintah kemudian nanti menyampaikan usulan mengenai proyeksi dari asumsi makro kita. Selain capital inflow yang sifatnya *sorthem* seperti untuk pembelian SBN dan stock atau saham yang meningkat secara cukup signifikan terutama sesudah Pemilu kemarin. Kita juga lihat penanaman modal di dalam negeri juga mengalami *recovery* yang cukup sehat. Apabial dilihat di kuartal kedua 2019, PNBN kita masih terus meningkat dan lebih kuat dari year on year kuartal I yang tumbuh 14,1 menguat menjadi 18,6. Memang ini walaupun *double digit* pada level belasan dibandingkan tahun yang lalu yang tumbuh 32%, 30%, 28% kuartal II 34 2018 ini lebih rendah akan tetapi ini tetap *double digit* yang solid.

Sementara itu kalau kita lihat PMA yang tahun lalu sangat mengalami dampak akibat kenaikan suku bunga internasional dan capital out flow ditambah dengan kondisi di Indonesia menjelang Pemilu, maka PMA semenjak kuartal II 2018 terus mengalami kontraksi minus 12, minus 20, minus 1,6 dan minus 0,9 sampai kuartal I 2019. Sesudah itu kuartal II terjadi rebond di 9,6% gross year on year kuartal II tahun 2019.

Hal ini untuk meng-*confirm* atau mengkonfirmasi tadi yang saya sampaikan bahwa sesudah siklus politik Pemilu dan melihat pondasi Indonesia di mana gross kita relative tinggi dibandingkan *emerging market* yang lain stabilitas kita sangat terjaga, gross tinggi di tambah dengan inflasi rendah, defisit dari fiskal kita rendah, dept to GDP ratio rendah dibandingkan dengan negara-negara, maka Indonesia posisinya menjadi relative *outstanding* dibandingkan dengan negara lain. Sehingga memunculkanlah *confident*. Apabila Pemerintah terus melakukan fokus *restructuring* dari sisi structural, reformasi ini akan terus menstabilkan *confident* terhadap perekonomian Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu atau tambahan faktor positif dari perekonomian kita.

Dengan demikian Pimpinan, dengan tadi adanya gambaran yang campur antara di satu sisi global *enforcement*-nya sangat tidak pasti dan tensionnya sangat tinggi. Namun, di sisi lain *positioning* Indonesia yang relative baik dan meng-*established* reputasi yang bagus secara internasional. Kita masih masuk di dalam tataran, di dalam gross outlook kita adalah optimis namun hati-hati.

Kami menyampaikan asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 adalah 5,3% yang didukung oleh permintaan agregat sebagai berikut. Dari sisi konsumsi rumah tangga pertumbuhannya diperkirakan masih di sekitar 5, kita proyeksi di bawah 5. Meskipun

kalau kita lihat sampai dengan kuartal II kita melihat konsumsi rumah tangga kita masih relative solid di atas 5%. Untuk konsumsi rumah tangga sendiri masih 5% tetapi konsumsi lembaga njon profit rumah tangga itu negative, ini akibat pasca Pemilu. Konsumsi Pemerintah tahun depan diperkirakan masih bisa berkontribusi 4,3% sedangkan investasi di proyeksikan pada 6% ini adalah proyeksi yang cukup di atas 5, namun tidak mencapai ke 7%. Sedangkan mungkin yang akan menghadapi ketidakpastian adalah pada sisi ekspor.

Kami mengasumsikan tahun depan ekspor sudah bisa recovery dengan pertumbuhan 3,7. Barangkali ini adalah yang paling perlu untuk dilihat lagi, karena memang ekspor dengan tadi kami menyampaikan *global economic outlook* dan *global trade outlook* yang melemah tahun ini kita masih perlu untuk melihat kepastian apakah tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia bisa lebih kuat. Dan oleh karena itu, ekspor kita bisa masuk dalam zona positif. Secara keseluruhan perekonomian kita tahun 2020 kita proyeksikan tumbuh di 5,3. Lembaga-lembaga internasional mungkin berbeda di dalam outlook proyeksi. IMF menyampaikan 5,2 dan world bank 5,2 untuk tahun 2020 dan ADB di 5,3%.

Untuk inflasi mungkin nanti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia akan menyampaikan lebih detail. Kami mengusulkan 3,1% sebagai landasan perkiraan tahun 2020. Hal ini didasarkan kepada di satu sisi pengendalian harga-harga tetap akan dilaksanakan terutama untuk *administered price*. Pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara menjaga stabilitas harga dengan melakukan belanja yang semakin produktif.

Pemerintah juga akan terus fokus menjaga agar ketersediaan pasokan dan distribusi dari barang-barang di Indonesia terutama barang-barang kebutuhan vital dari masyarakat tetap bisa dijaga secara stabil dan aman. Dan tentu *policy* dari Bank Indonesia yang kemudian bisa menciptakan espektasi inflasi yang sekarang relative sudah stabil di level rendah, yaitu 3%.

Kita akan terus meneruskan koordinasi yang baik selama ini antara Pemerintah dengan Bank Indonesia melalui tim pengendali inflasi nasional di dalam rangka untuk terus menjaga agar inflasi di Indonesia akan terus rendah dan sesuai dengan tren inflasi dunia yang sebetulnya pada saat ini dalam juga posisi sangat rendah. Beberapa negara bahkan mengalami deflasi.

Untuk nilai tukar tahun 2020, kami menyampaikan asumsi tahun depan adalah di Rp14.400 ini nanti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia juga mungkin menyampaikan pandangan dari Bank Indonesia. Dari Pemerintah kisaran Rp14.400 adalah kombinasi di satu sisi adanya ketidakpastian global yang akan menimbulkan selalu swing dari sentimen dan swing sentimen ini terus menerus akan mewarnai apa yang disebut nilai tukar, karena dia adalah dikelola secara floating. Dan juga di sisi lain sekarang RRT sudah membiarkan nilai tukar reminded terhadap Dolar yang sudah menembus angka 7. Itu adalah level threshold psikologis, sekarang sudah terbiasa di atas angka 7. Ini yang kemudian menimbulkan pada bulan Juli yang lalu Amerika menuduh RRT melakukan apa yang disebut *currency manipulation* atau menggunakan *currency* dan ini yang kemudian mengkhawatirkan apakah akan terjadi

tensi mengenai bagaimana nilai tukar antar negara dipakai sebagai alat untuk *policy* perdagangan atau biasanya di sebut competitive defaluasi.

Situasi potensi *currency war* atau terjadinya kompetitive defaluasi adalah sesuatu yang sekarang sudah disampaikan di antara negara yang sedang bersengketa dagang. Dan ini yang akan menambahkan ketidakpastian global. Disisi lain kami melihat pondasi ekonomi Indonesia masih relative baik, tadi kami sampaikan aliran modal masuk, baik yang sifatnya PMA yang sifatnya jangka panjang maupun yang sifatnya jangka pendek seperti untuk stock dan bond. Dan juga tentu kita akan menghormati Bank Indonesia yang akan melaksanakan misi tugasnya di dalam menjaga stabilisasi nilai tukar dan Rupiah kita. Ini adalah yang menyebabkan kemudian level Rp14.400 sebagai level yang diperkirakan mencerminkan potensi dari berbagai faktor yang tadi kami sampaikan.

Untuk asumsi terakhir, yaitu SPN 3 bulan tahun depan kami perkirakan di level 5,4%. Hal ini dilandaskan kepada di satu sisi tahun 2018 dan 2019 di mana suku bunga internasional terutama dari federal meningkat dan itu juga terlihat pengaruhnya kepada suku bunga Republik Indonesia Rupiah kita dari 5,0 naik ke 5,8. Namun di sisi lain seperti yang terlihat trennya dalam beberapa bulan terakhir di mana arah kebijakan bank sentral di Amerika Serikat dan negara maju yang membalik, yaitu dengan penurunan suku bunga itu menyebabkan potensi untuk tahun 2020 bisa lebih rendah dari tahun 2019.

Inipun kami harus memberikan catatan bahwa retorika di level global antara *federal reserve* dengan Presiden Trump itu dalam situasi yang *untrusted*. Di mana Presiden Amerika Serikat bisa menyampaikan pandangan yang sangat *direct* mengenai arah dari kebijakan suku bunga di *federal reserve* dan dalam *federal reserve* sendiri terjadi dinamika untuk tetap menjaga independensi dari *federal reserve*.

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Kami ingin menyampaikan kondisi hari ini di dunia bukanlah kondisi yang biasanya. Yang dulu kita anggap tradisional itu biasa sekarang tidak lagi rambu-rambu itu digunakan. Oleh karena itu, memang kami menyadari bahwa untuk membuat asumsi tahun 2020 kami harus tetap menyampaikan suatu argument namun pada saat yang sama Pemerintah akan selalu waspada terhadap perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan global kita yang sekarang menghadapi situasi yang tidak biasa. *It's a new normal to being up normal*, itu kira-kira kayak gitu.

Dengan demikian asumsi kami di dalam 2020 yang kami gunakan sebagai kalkulasi dari proyeksi penerimaan dan belanja negara adalah pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi 3,1 dan nilai tukar Rp14.400 dan suku bunga SPN 3 bulan 5,4%. Kami tentu berharap bahwa pada sore hari ini akan bisa didiskusikan dengan Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan apa yang disebut langkah-langkah yang kita semua bisa sepakat apa yang bisa kita gunakan di dalam untuk menghitung berbagai variable yang ada di dalam nota keuangan dan RAPBN sehingga kita tetap bisa menjaga APBN 2020 dalam kondisi yang kredible, prudent, optimis, namun tetap hati-hati.

Demikian Pimpinan yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami persilakan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Menteri Keuangan, Ketua DK OJK, DGS BI, Kepala BPS serta Ibu dan Bapak sekalian.

Kami melengkapi dari yang disampaikan Menteri Keuangan, kami akan fokus kepada target pembangunan. Berikut *highlight* dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Kalau kita lihat target pembangunan tahun 2020 yang sudah disampaikan Bapak Ketua di awal rapat, maka salah satu yang nanti akan menjadi tantangan utama adalah bagaimana kita membawa lebih bawah lagi tingkat kemiskinan dari yang posisi terakhir menurut Susenas bulan Maret, yaitu 9,41% menjadi di bawah 9% di tahun 2020 tepatnya di range antara 8,5% sampai dengan 9%.

Tentunya ketika bicara penurunan tingkat kemiskinan salah satunya kita akan bicara mengenai efektifitas dana desa, karena secara presentase tingkat kemiskinan relative lebih tinggi di desa dibandingkan dengan di kota. Sedangkan ketimpangan atau indeks gini kita melihat bahwa dari Susena terakhir bulan Maret 2019 kemarin indeks ini turun lagi menjadi 0,382 dan kita harapkan tahun depan kita bisa menemus teritori di bawah 0,38 tepatnya pada range antara 0,375 sampai dengan 0,38.

Berbeda dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan di desa lebih rendah daripada tingkat ketimpangan di kota, berarti upaya penurunan ketimpangan harus lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan dengan di desa. Khusus untuk tingkat pengangguran terbuka menurut Sakernas bulan Februari 2019 diseputaran 5% dan kita harapkan tahun depan bisa menembus ke bawah 5%, yaitu pada range 4,8% sampai dengan 5,1%.

Dan konteks pengangguran ini ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita dalam mengambil kebijakan dan melakukan upaya untuk mengurangi pengangguran itu sendiri, yaitu:

1. Masih lebih tingginya tingkat pengangguran usia muda terutama usia 15 sampai dengan 24 tahun.

2. Masih paling tingginya proporsi lulusan SMK sebagai lulusan yang menganggur.
3. Masih lebih banyaknya pekerjaan di sektor informal dibandingkan bekerja di sektor formal.

Tentunya 3 hal ini harus menjadi perhatian tidak hanya kita ingin menurunkan tingkat pengangguran akan tetapi kita juga ingin memperbaiki kualitas dari lapangan kerja itu sendiri.

Kemudian karena tahun depan 2020 dan 5 tahun ke depan RPJMN tahun 2020-2024 kita akan fokus kepada sumber daya manusia, maka peningkatan indeks pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan dan daya beli, ini akan menjadi sangat penting dan kita harapkan IPM naik lagi, makin jauh meninggalkan 70, di mana 70 itu adalah batas antara *high human development indeks* dengan yang *low*. Kita sudah melewati 70 tepatnya tahun depan kita berharap bisa mencapai 72,51.

Itu adalah target pembangunan yang kita harapkan bisa dicapai pada tahun depan dan tentunya ini akan sangat didukung atau sangat dipengaruhi oleh komposisi APBN yang ada berdasarkan prioritas dari Rencana Kerja. Dari Rencana Kerja Pemerintah sendiri tahun 2020 dengan harapan untuk bisa mencapai target pembangunan yang baru kami sampaikan, temanya jelas yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas dengan 5 prioritas nasional, pembangunan manusia, kemudian infrastruktur dan yang ketiga adalah terkait dengan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang keempat mengenai ketahanan pangan air, energi, lingkungan hidup dan kelima stabilitas pertahanan dan keamanan.

Nah, kami langsung ke halaman 8 untuk menyampaikan beberapa program atau upaya yang harus dilakukan agar kita bisa mencapai target pembangunan yang di halaman pertama tadi. Misalkan dilanjutkannya PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau Jaminan Kesehatan Nasional untuk hampir 97 juta jiwa. Kemudian Kartu Indonesia Pintar untuk 20 juta siswa, bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu, baik melalui bidik kisi maupun keep kuliah untuk lebih dari 400 ribu mahasiswa serta terus dilanjutkannya dengan perbaikan data tentunya, yaitu untuk PKH (Program Keluarga Harapan) yang merupakan bantuan tunai bersyarat sebesar 10 juta keluarga penerima dengan bantuan pangan non tunai atau kartu sembako murah yang diterima 15,6 juta keluarga penerima.

Selain itu, terkait dengan sumber daya manusia kita juga harus mengatasi masalah kesehatan, yaitu masalah stunting dengan beberapa program seperti makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun bagi balita yang kurus dan juga penyediaan obat gizi.

Kemudian kalau kami lanjut langsung di halaman 10, masih terkait sumber daya manusia akan tetapi kita sudah bicara mengenai mengenai visi kualitas tenaga kerja. Di mana kita ingin meningkatkan produktifitas tenaga kerja sekaligus menciptakan lapangan kerja itu sendiri terutama dengan memperkuat jalur vokasi. Akan dilakukan dalam APBN nanti pelaksanaan pelatihan untuk lebih dari 100 ribu orang berikut sertifikasi tenaga kerja untuk 375 ribu orang. Ada 2000 BLK komunitas yang akan dikembangkan serta peningkatan kualitas SCM industry yang meliputi pelatihan sertifikasi dan penempatan.

Dan tentunya bicara mengenai sumber daya manusia kita tidak boleh melupakan ketahanan pangan di halaman 11. Di konteks ketahanan pangan selain budidaya padi dan jagung memperbanyak benih yang bermutu, perbaikan irigasi, kita juga memperhatikan misalkan pengembangan dari produksi garam untuk bisa memperkuat akses dan kualitas pangan itu sendiri.

Mungkin itu secara garis besar Bapak Ketua, yang bisa kami tambahkan yang terutama langsung terkait dengan target pembangunan di dalam RAPBN 2020.

Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Menteri.

Silakan Ibu Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA:

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati,
Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Ketua Dewan Komisiner OJK dan Bapak Kepala BPS yang saya hormati,
Serta hadirin sekalian.**

Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia dalam Rapat Kerja penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2020.

Dalam kesempatan ini kami akan memfokuskan pandangan pada kondisi perekonomian terkini dan prospek ke depan, terutama pada pertumbuhan ekonomi nilai tukar Rupiah dan inflasi. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentunya tidak terlepas dari dinamika perekonomian global yang saat ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Tadi Ibu Menteri Keuangan sudah banyak membahas terkait dengan kondisi perekonomian global, namun kami akan meng-*highlight* ada 3 hal yang menyebabkan *impeact* dari perkembangan ekonomi global terhadap ekonomi domestik.

Yang pertama, adanya perang dagang yang berkepanjangan sehingga ini menyebabkan kami akhirnya merevisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% di tahun 2019 dari 3,6% di tahun 2018. Dan tekanan pada ekonomi global kami perkirakan juga akan terus berlanjut di tahun 2020 sehingga kami juga merevisi ke bawah perekonomian dunia menjadi 3,3%.

Kedua, terkait dengan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang kami juga perkirakan akan turun secara mendalam, karena ketegangan yang berkepanjangan antara Tiongkok dan Amerika. Sehingga kami juga merevisi ke

bawah volume perdagangan dunia turun menjadi 1,6% pada tahun 2019, walaupun kita melihat ada perbaikan sedikit di tahun 2020 menjadi 2,7%.

Tentunya perkembangan harga komoditi global ini akan memberikan dampak ekspor Indonesia yang memang masih sangat mengandalkan ekspor komoditi. Karena kami memperkirakan komposit indeks untuk harga komoditas ekspor Indonesia akan turun sebesar 3,3% di tahun 2019 dan penurunannya ini lebih dalam kalau dibandingkan dengan penurunan di tahun 2018 yang sebesar 2,8%.

Namun demikian, di tahun 2020 walaupun kami melihat masih sedikit terjadi kontraksi akan tetapi relative menipis karena juga adanya perkiraan sedikit membaik di perekonomian global. Nah, apa yang kami perhatikan adalah beberapa negara maju termasuk juga Amerika mereka juga telah mulai menurunkan suku bunganya dimana untuk the fed sendiri pada bulan Juli 2019 telah menurunkan suku bunganya sebesar 25 basis point. Dan langkah pelonggaran kebijakan moneter juga ditempuh oleh beberapa negara antara lain India, Philipina, Malaysia, Thailand serta Korea.

Kemudian kondisi ketiga terkait dengan ekonomi global adalah adanya ketidakpastian pasar keuangan global itu terus berlanjut sehingga mendorong pergeseran penempatan dana global ke aset yang dianggap aman, seperti obligasi Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang serta komoditas emas. Bahkan kalau kita melihat bond Amerika untuk durasi 10 tahun itu sudah mengalami *invert tile* di mana kupon jangka panjang itu sudah lebih rendah dibandingkan dengan kupon yang jangka pendek. Ini menandakan atau mengindikasikan bahwa dalam jangka menengah tekanan pada ekonomi itu masih akan terus ada, sehingga situasi bunga rendah itu akan tetap terjadi di ekonomi global.

Dan dinamika ekonomi global tersebut tentunya perlu dipertimbangkan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan menjaga arus masuk modal asing sebagai penopang stabilitas eksternal.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Tiga perkembangan ekonomi global tersebut memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 tercatat 5,05% year on year sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang mencapai 5,07%. Hal ini utamanya disebabkan karena melambatnya ekspor yang juga mengalami kontraksi sementara permintaan domestik khususnya dipengaruhi oleh konsumsi masih cukup tinggi untuk menopang perlambatan disisi ekspor tersebut. Dan investasi juga relative stabil sehingga dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan tetap baik didukung oleh permintaan domestic khususnya investasi yang akan tumbuh tetap tinggi dan juga konsumsi masyarakat yang solid. Berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi didukung oleh bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif serta kebijakan fiskal dan reformasi structural yang ditempuh oleh Pemerintah. Sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan

akan berada di bawah titik tengah kisaran 5,0 hingga 5,4% dan meningkat menuju titik tengah dikisaran 5,1% hingga 5,5% pada tahun 2020.

Kalau kita lihat secara spasial atau regional, maka tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa, Sumatera, dan Bali masih cukup solid karena didukung oleh permintaan domestik khususnya adalah konsumsi swasta dan Pemerintah seiring dengan perayaan hari besar keagamaan nasional dan periode liburan di tengah tekanan pada kinerja ekspor di hampir seluruh wilayah.

Perekonomian global di tahun 2019 yang kurang menguntungkan pada gilirannya juga mempengaruhi kinerja sektor eksternal ekonomi Indonesia. Namun demikian, bauran kebijakan yang secara konsisten ditempuh oleh Bank Indonesia dengan sinergi yang kuat dengan kebijakan Pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian dan dampak negative dari perekonomian global.

Neraca pembayaran Indonesia di triwulan II 2019 tetap baik, ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial sebesar 7,1 miliar Dolar Amerika. Hal ini sejalan dengan prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif dan daya tarik investasi keuangan domestik yang tetap tinggi. Namun demikian, perhatian perlu kita berikan kepada *current account deficit* yang meningkat dari 7 miliar Dolar Amerika atau 2,6% PDB di triwulan I 2019 menjadi 8,4 miliar Dolar Amerika atau 3% dari PDB di triwulan II 2019.

Kami mengamati bahwa naiknya defisit tersebut memang terkait dengan perilaku musiman adanya repatriasi deviden dan pembayaran bunga utang luar negeri serta dampak dari volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang menurun. Ke depan ketahanan eksternal di perkirakan tetap baik didukung dengan berlanjutnya surplus neraca modal dan finansial serta tetap terkendalinya defisit transaksi berjalan yang pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan dalam kisaran 2,5 hingga 3% dari PDB.

Stabilitas eksternal ekonomi Indonesia juga tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah pada tahun 2019 yang tetap terkendali. Kinerja Rupiah 2019 year to date atau dari Januari hingga posisi saat ini di Agustus tercatat apresiasi di tengah mata uang negara peers yang mengalami depresiasi. Memang di bulan Agustus ini tekanan terhadap mata uang *emerging market* relative meningkat, karena adanya tekanan pada depresiasi Yuan. Seiring dengan meningkatnya eskalasi *trade war* antara Amerika dengan Tiongkok.

Namun demikian, kalau kita lihat dari volatilitas Rupiah tetap relative stabil dan ini juga karena disupport dengan cadangan devisa yang tetap tinggi. Demikian juga Bank Indonesia mengeluarkan instrument untuk *forward market* yaitu the n the f, dan inilah salah satu instrument yang bisa meredam volatilitas Rupiah sehingga mereka tidak perlu bermain di luar, di Singapura tetapi mereka bisa meng-cover posisinya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Ke depan Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan mekanisme pasar yang terjaga. Perkiraan ini ditopang dengan prospek aliran masuk modal asing ke Indonesia yang tetap terjaga, seiring dengan ekonomi domestik yang tetap baik dan imbal hasil yang menarik serta dampak positif kebijakan moneter longgar di negara maju. Dan untuk mendukung efektifitas kebijakan nilai tukar dan

memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik di pasar uang maupun valas.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Perekonomian domestic yang tetap baik dan nilai tukar Rupiah yang terkendali menopang inflasi terjaga pada level yang rendah dan stabil. Inflasi indeks harga konsumen sampai Juli 2019 tercatat 3,32% sedikit membaik dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,28% tapi masih tetap di bawah target inflasi dari Bank Indonesia yang sebesar 3,5 plus minus 1%. Inflasi yang terkendali ini didorong oleh inflasi inti yang terjaga dan didukung oleh ekspektasi yang baik seiring dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia menjaga stabilitas harga, permintaan agregat yang terkelola dan pengaruh harga global yang minimal.

Kelompok *administered price* kembali mencatatkan deflasi di pengaruhi dengan berlanjutnya dampak kebijakan penurunan tarif batas atas Angkutan udara seerta koreksi tarif angkutan antar kota dan tarif kereta api serta hari raya Idul Fitri. Sementara itu inflasi kelompok *volatile food* melambat meskipun perkembangan harga beberapa komoditas hortikultura tetap perlu menjadi perhatian khususnya adalah cabe merah. Cabe merah kami melihat sudah mulai terjadi inflasi di beberapa daerah.

Namun demikian, inflasi yang rendah juga didukung dengan inflasi yang rendah di hampir seluruh wilayah atau seluruh provinsi. Dan kami memperkirakan bahwa inflasi yang rendah ini dan terkendali akan berlanjut ke depannya. Dan Bank Indonesia memperkirakan inflasi 2019 tetap rendah dan stabil sehingga berada di bawah titik tengah kisaran inflasi 3,5 plus 1%. Prospek ini ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk tetap konsisten menjaga stabilitas harga sehingga inflasi inti diperkirakan rendah ditopang dengan espektasi inflasi yang terkendali serta nilai tukar Rupiah yang terjaga. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi ini juga terus diperkuat, baik di tingkat pusat dan di daerah melalui TPID dan TPID.

Pada 2020 kami memperkirakan inflasi tetap rendah pada kisaran target 3 plus minus 1%. Tren penurunan inflasi pada 2020 dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali sejalan dengan memadainya kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kenaikan permintaan. Distribusi barang dan jasa juga semakin membaik sejalan dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas yang berdampak positif pada penurunan biaya transportasi dan logistik dan akhirnya mempengaruhi inflasi yang rendah.

Prospek inflasi yang rendah juga dipengaruhi oleh koordinasi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga turut mengendalikan inflasi *volatile food* dalam level yang rendah. Espektasi inflasi juga terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Dengan berbagai gambaran tersebut, kami melihat prospek perekonomian Indonesia tetap positif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi akan membaik, ketahanan eksternal terjaga, nilai tukar terkendali, dan inflasi rendah. Secara keseluruhan seperti kami sampaikan sebelumnya, prospek perekonomian Indonesia 2020 adalah sebagai berikut yang tampak dalam tabel.

Untuk pertumbuhan ekonomi 2019 kami perkirakan akan berada di bawah titik tengah range 5,0 hingga 5,4%. Dan 2020 proyeksinya adalah di titik tengah 5,1 sampai dengan 5,5%. Untuk nilai tukar kami perkirakan 2019 proyeksinya berada di range Rp14.000 hingga Rp14.400 dan di 2020 kami perkirakan proyeksinya berada di Rp13.900 hingga Rp14.300. Dan untuk inflasi kami perkirakan berada di bawah titik tengah 3,5 plus minus 1% dan 2020 berada di titik tengah 3 plus minus 1%.

Ke depan Bank Indonesia akan secara konsisten mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Dalam kaitan ini Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan Bank Indonesia seven days reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 5,5% pada Juli dan Agustus 2019.

Kebijakan tersebut konsisten dengan:

1. Rendahnya prakiraan inflasi yang berada di bawah titik tengah sasaran;
2. Tetap menariknya imbal hasil investasi aset keuangan domestik sehingga akan mendukung stabilitas eksternal;
3. Sebagai langkah preemtif untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan dari dampak perlambatan ekonomi global.
4. Strategi operasi moneter juga diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif.

Pada bulan Juni yang lalu Bank Indonesia juga menurunkan giro wajib minimum sebesar 50 basis point sehingga saat ini GWM berada di level 6%. Kemudian juga sejak minggu lalu Bank Indonesia juga akan meningkatkan intensitas operasional moneternya di instrument repo dengan lelang yang sebelumnya 2 kali seminggu akan ditingkatkan menjadi lelang setiap hari. Jadi ini juga untuk menjamin agar likuiditas di pasar uang akan tetap tersedia.

Kemudian kebijakan makro prudential akan tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian termasuk pembiayaan ramah lingkungan. Kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan Bank Indonesia akan melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal dan perlunya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Tentunya koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini ijin pula kami secara khusus ingin menyampaikan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa meningkatkan peran serta pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk secara aktif mendukung transformasi ekonomi keuangan digital yang kami wujudkan dalam melalui 5 visi SPI 2025, yaitu:

1. Mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi Bank Sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung inklusi keuangan.
2. Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking sistem maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
3. Menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari resiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, kerjasama bisnis maupun kepemilikan perusahaan.
4. Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat.
5. Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestic di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestic dengan memperhatikan prinsip resi procalitas.

Dan sebagai informasi pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu, Bank Indonesia telah mengeluarkan Q are standart Indonesia atau disebut Kris unggul, dimana nantinya per 1 Januari seluruh lembaga penyelenggara sistem pembayaran diwajibkan menggunakan Kris yaitu Q are yang sudah standart, sehingga ini juga akan memudahkan bank sentral atau Bank Indonesia dalam mengelola dan memonitor transaksi digital ekonomi dalam perekonomian kita.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Demikianlah pandangan kami mengenai beberapa asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2020 yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatian Anggota Dewan terhormat kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan kepada OJK.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK:

**Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan seluruh jajarannya,**

**Yang kami hormati Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro beserta jajarannya,
Yang kami hormati juga Bapak Suharyanto Kepala BPS dan jajarannya,
Ibu Destry beserta jajarannya,
Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama kami atas nama Anggota Dewan Komisiner OJK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam Rapat Kerja mengenai pembahasan asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020.

Pada kesempatan ini kami hanya membatasi 3 hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama kami ingin *share* kapasitas yang diharapkan dari sektor perbankan dalam mendukung sasaran ekonomi makro yang sebagaimana tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Menteri Keuangan maupun Ibu Destry. Yang kedua, kami akan *review* sedikit tentang kondisi sektor keuangan. Dan tentunya ini menjadi bahan kami untuk melihat sejauhmana sektor keuangan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi makro yang sudah dipaparkan.

Yang ketiga, kami akan menyampaikan bagaimana prioritas yang nanti terutama prioritas sectoral yang akan kami arahkan kepada sektor keuangan, baik perbankan, pasar modal maupun asuransi sehingga nanti pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan betul-betul pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas yang bisa mendukung betul-betul penyerapan tenaga kerja, pendapatan pajak, dan juga keseimbangan pendapatan oleh masyarakat.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan mengenai bagaimana peran sektor keuangan yang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,3% yang ini sebenarnya angka-angka inikan kami rujuk dari detail angka-angka di RAPBN bahwa perbankan ini diharapkan bisa mendukung sekitar 12% sampai 14% di 2020. Sedangkan pada saat ini kondisi terakhir perbankan ini berdasarkan RBB adalah sudah 10,91 dan juga realisasi di 2019 ini kita harapkan bisa sekitar 9% sampai dengan 11%, sehingga kami di 2020 untuk mendukung pertumbuhan 5,3 kami harus menyalurkan sekitar ringnya antara 12% sampai 14%. Tentunya kita perlu *effort* yang besar bagaimana kebijakan bersama kita agar ring pertumbuhan kredit perbankan tadi bisa betul-betul mencapai antara 12% sampai dengan 14%.

Mudah-mudahan kalau dengan upaya kita bersama ini bisa untuk memitigasi ini bisa kita *buyers*-nya bisa ke atas antara mungkin mendekati antara 12% sampai 13%. Kami juga dengan tentunya harus didukung dengan pertumbuhan DPK. Pada saat ini DPK perbankan angka terakhir sudah sekitar 8%, sudah meningkat, kita harapkan di 2020 untuk dengan pertumbuhan kredit sebesar yang 12% sampai dengan 14% ini kita harapkan sekitar 10% sampai 12%. Dan ini dengan kondisi

ekonomi makro dunia yang mungkin kondusif untuk menurunkan suku bunga ini juga akhirnya likuiditas barangkali forto folio akan banyak masuk ke Indonesia dan tentunya ini mendukung adanya kenaikan DPK.

Dan RBB akhir tahun 2019 ini 11,09% jadi hemat untuk di 2020 mungkin tidak terlalu sulit untuk bisa mencapai antara 10% sampai 12%. Untuk penghimpunan di pasar modal, pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi 5,3% di harapkan 192 triliun, sedangkan pada saat ini 2019 ini kita targetkan 176 triliun bahkan sekarang sudah 120 triliun. Jadi hemat kami di 2019 ini bisa tercapai dan mungkin di 2020 dengan kondisi ekonomi yang membaik harapan kami juga bisa tercapai. Inilah kondisi yang tentunya yang diharapkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini sektor keuangan bisa mencapai dalam target-target ring tersebut.

Berikutnya kami mohon ijin untuk menyampaikan bagaimana perkembangan terakhir di sektor keuangan. Apakah mempunyai kapasitas untuk mendukung pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan dalam asumsi ekonomi makro sehingga nanti kita bisa melihat sejauhmana kemampuan yang ada.

Kalau kita lihat dari car perbankan, kami langsung sektor keuangan saja ya. Car perbankan ini cukup tinggi ada 23,37% dan juga di asuransi juga jauh di atas *threshold* jadi kami tidak mempunyai kekhawatiran bahwa permodalan perbankan akan kesulitan untuk mendukung pertumbuhan kredit sebagaimana tadi sudah kami sampaikan di depan. Kita mempunyai ruang yang cukup luas untuk mendukung pertumbuhan kredit tersebut.

Yang kedua, mengenai likuiditas kalau kita lihat bahwa ekses riset tercatat sebesar 637 triliun per 21 Agustus 2019 sedangkan kalau tadi dikredit harus memberikan kredit sebesar 593 triliun. Dengan mempertimbangkan nanti multiplier effect yang ada kami tidak kesulitan dan di samping itu juga kami akan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana agar kebijakan untuk menjaga likuiditas ini, tentunya *open market operation*-nya bank Indonesia dan juga baik dalam valas maupun dalam Rupiah ini kondusif untuk tadi mendukung adanya pertumbuhan kredit sebesar 12% sampai 14% di 2020. Sebenarnya kami yakin itu bisa juga terpenuhi.

Dan kalau kita lihat mengenai pertumbuhan kredit, tadi sudah kami sampaikan bahwa terakhir ini sudah 9,58% secara year on year atau dalam RBB di atas 10% jadi double digit, jadi kami yakin ini bisa. Namun, sebagaimana kami sampaikan ini lebih banyak didukung oleh bank-bank buku 3 dan buku 4 sehingga kami melihat ini nanti kita harapkan buku 3 dan buku 4 ini yang juga mendukung pertumbuhan di 2020.

Untuk di pasar modal sebagaimana kami sampaikan, kalau kita lihat kepercayaan asing semakin meningkat, baik di SBN maupun di pasar saham. Kalau kita lihat investor asing membuka net buy sebesar 59,7 triliun dan di pasar SBN sebesar 115,7 triliun secara year to date pada tahun ini, sehingga kami kita harapkan di 2020 juga tentunya kondisinya akan lebih baik, karena tren yield-nya tentunya akan lebih menurun dibandingkan pada tahun ini.

Dan juga kalau kita lihat mengenai volatilitas di pasar saham juga indeksnya sudah mulai membaik, sudah di atas 6000 bahkan ini sudah semakin lama akan semakin meningkat dan dengan volatilitas yang terkendali.

Dan pada saat ini in rising fund di pasar modal telah mencapai 120 triliun dari 109 penawaran umum dengan 30 diantaranya adalah emiten saham baru dan sementara itu dana kelola investasi mencapai 805,6 triliun. Sehingga nanti ini kita harapkan kalau tadi targetnya 192 triliun kami harapkan bisa tercapai karena pada tahun ini saja sudah 120 triliun dan akhir tahun kita harapkan bisa mencapai 180 lebih.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang berbahagia.

Kami masuk setelah kami melihat bahwa sebenarnya industry perbankan pasar modal sektor keuangan mempunyai potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sebagaimana ditargetkan. Kami lebih konsen adalah bagaimana alokasi pembiayaan yang dilakukan sektor keuangan tersebut ini betul-betul kearah yang mendorong pertumbuhan. Artinya, bukan hanya kepada perusahaan yang sekarang sudah ada dan juga agar kalau perusahaan yang sekarang sudah ada ini dapat juga menyerap tenaga kerja baru atautkah mungkin mendorong ekspor dan juga ramah lingkungan. Jadi ada kaidah-kaidah yang akan tentunya nanti pada saat kita minat perbankan maupun mendorong emiten di pasar modal, kita akan mengarahkan kepada sektor-sektor tersebut termasuk adalah sektor UMKM melalui KUR yang sebenarnya kami lakukan dengan metode kluster. Kebijakan kita dalam rencana bisnis akan kita dorong kesana, sehingga dengan cara itu kami harapkan bahwa pertumbuhan yang ada itu betul-betul berkualitas. Bisa menyerap tenaga kerja, mendorong ekspor, subsitusi impor, dan juga ramah lingkungan dan juga bisa memberikan pemerataan pendapatan baik daerah maupun ke individu.

Inilah sebenarnya nanti yang kita ada beberapa kebijakan kalau memang diperlukan akan kita dorong ke arah tersebut. Dan ini kami harapkan akan bisa dimasukkan dalam bisnis plan industry perbankan maupun bisnis plan pasar modal.

Bapak dan Ibu Pimpinan Anggota Dewan yang terhormat.

Kami tentunya ini tidak bisa sendiri, tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait terutama bagaimana realokasi pemberian kredit ini bisa ke arah yang lebih masuk dalam sasaran-sasaran yang tadi kami sebutkan. Untuk itu, tentunya kami mohon nanti apabila ada beberapa pandangan kami sangat terbuka agar bagaimana realokasi pembiayaan tadi bisa betul-betul memenuhi target kita dalam pembangunan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Yang terakhir Bapak Kepala Badan Pust Statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta seluruh jajaran.**

Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada BPS untuk memberikan pandangan terhadap asumsi makro tahun 2020. Saya akan memberikan catatan singkat mengenai beberapa komponen.

Yang pertama adalah mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% untuk tahun 2020. Dengan memperhatikan perekonomian global yang cenderung melambat dan kemudian perang dagang yang belum usai dan juga pergerakan harga komoditas yang sangat fluktuatif. Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% lumayan tinggi dan saya yakin tidak akan mudah mencapainya akan tetapi bukan berarti tidak mungkin. Untuk bisa menuju ke 5,3% dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi terkini ada beberapa hal yang nampaknya perlu kita benahi. Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2019 ini hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali pertambangan. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan ini perlu mendapat perhatian utama, karena share dari industri pengolahan ini adalah sebesar 19,5% sementara menyerap tenaga kerja sebesar 14%, sehingga ketika terjadi perlambatan sedikit saja pada industri pengolahan itu akan berdampak besar kepada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kita perlu melakukan pembenahan di industri pengolahan.

Dan kalau kita lihat sampai dengan triwulan II 2019 industri-industri yang bergerak bagus adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang nilai ekspornya juga meningkat ke Amerika, kemudian industri kertas dan barang dari kertas juga tumbuh bagus, demikian juga dengan industri makanan dan minuman. Tetapi kita perlu memberikan perhatian untuk industri karet terutama yang pada triwulan ini mengalami pertumbuhan negative. Jadi kita masih punya PR untuk melakukan hilirisasi supaya bisa menghasilkan nilai tambah dan juga penciptaan lapangan kerja. Kalau industri pengolahan ini bisa kita tingkatkan, kemudian pertanian juga bergerak kita harapkan perdagangan juga akan bergerak maju.

Kemudian dari sisi komponen pengeluaran, saya setuju dengan Ibu Menteri Keuangan bahwa untuk konsumsi rumah tangga kita harapkan tetap akan stabil karena inflasinya kita punya pengalaman panjang untuk menjaganya tetapi kita ekstra

hati-hati dengan komponen ekspor dan impor. Kalau kita lihat data terakhir pada Januari sampai dengan Juli 2019 ini, neraca perdagangan kita masih defisit sebesar 1,9 miliar. Dan kalau kita lihat per komoditas misalnya batubara sebetulnya volumenya masih menunjukkan kenaikan 8,15% artinya permintaan masih cukup tinggi, tetapi yang membuat nilainya menjadi turun adalah penurunan harga batubara yang sangat tajam. Pada bulan Juli 2019 ini turun 39% dibandingkan dengan Juli 2018.

Demikian juga dengan sawit, sawit ini volumenya masih mengalami kenaikan tetapi harganya juga kurang panjang agak berbeda ceritanya kalau kita bicara dengan karet, di mana volumenya turun karena ada pembatasan kuota, sementara harganya adalah naik. Jadi untuk komponen ekspor dan impor, saya pikir kita memang perlu menganalisisnya lebih hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan di ekonomi global.

Kemudian yang kedua untuk inflasi, target yang dipasang ada 3,1%. Kalau kita lihat inflasi pada bulan Juli ini adalah 3,32% masih berada di bawah target dan sejak tahun 2015 inflasi itu berkisar di angka 3. Artinya, kita sudah mempunyai pengalaman yang panjang untuk mengendalikan inflasi di bawah 3,5%. Dengan memperhatikan pengalaman panjang ini saya yakin 3,1% ini bisa ditercapa dengan catatan tidak ada kebijakan Pemerintah yang mengagetkan. Kemudian yang kedua, tentunya kita perlu mengantisipasi berbagai faktor yang tidak terduga, misalnya pada tahun ini adalah dampak dari musim kemarau yang cukup panjang yang diperkirakan akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober. Ini nanti akan mempengaruhi pergeseran musim panen untuk beberapa komoditas pangan yang berpengaruh cukup besar kepada angka inflasi.

Untuk angka kemiskinan dan ketimpangan yang tadi di pasang oleh Bapak Menteri PPN. Saya pikir target itu sangat *reasonable* meskipun kemungkinan jatuhnya ada di batas atas. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah dari evaluasi terakhir juga menunjukkan banyak progress, misalnya tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Kemudian di beberapa daerah penggunaan dana desa juga lumayan efektif kalau itu bisa dicontoh oleh daerah lain, saya pikir akan bagus sekali.

Kemudian komponen berikutnya adalah DPN dengan target 72,55. Kalau kita lihat dari 3 dimensi yang ada tingkat pendidikan menunjukkan progress yang lumayan bagus demikian juga dengan kesehatan. Yang perlu diwaspadai dari DPN ini kemarin sudah kita diskusikan dengan beberapa stakeholder bahwa ada kecenderungan meningkatnya angka perkawinan dini di beberapa daerah. Kemarin kita juga duduk dengan teman-teman BKKBN, Kemensos dan sebagainya untuk mengantisipasi.

Demikian pandangan singkat dari BPS Bapak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Baik, terima kasih Ibu Menteri, Bapak Menteri dan Bapak-bapak sekalian.

Sekarang tiba saatnya kami persilakan kepada Anggota Komisi XI DPR RI untuk memperdalam tentang pemaparan dari Pemerintah.

Kami persilakan kepada Bapak Sarmuji, Bapak Harry Poernomo.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Sayang sekali Ibu Menteri tidak ada, tapi apa boleh buat menyingkat waktu tolong disampaikan saja kepada Ibu Menteri nanti.

**Pimpinan dan teman-teman sejawat Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Segenap mitra kerja yang saya hormati, para Menteri dan jajarannya.**

Saya singkat saja, memang keadaannya saya membaca paparan chart ini halaman 7 dari Menteri Keuangan. Saya mencoba mengamati statistik dari tahun 1981 sampai dengan 2019 ini. Kelihatannya memang prospeknya atau kenyataannya dan prospek ke depan kita tidak akan ya mohon maaf kalau saya mungkin terlalu pesimistik. Kita tidak punya kemampuan yang cukup yang melompat kepada tingkat pertumbuhan yang menjamin kita menjadi negara berpendapatan tinggi. Karena memang sejak tahun 1981 memang rata-rata PDB kita berkisar 5 bahkan periode 90 sampai 2000 turun menjadi 4. Sehingga saya mengutip pendapat banyak pengamat kita mungkin memang akan menjadi negara berpendapatan rendah, mudah-mudahan pernyataan saya ini tidak benar. Tetapi apapun saya sepakat dengan Ibu Menteri, apapun yang kita alami ini kita syukuri saja, karena saya membaca media sosial juga Ibu Menteri sudah menyatakan kita mengalami krisis sekarang ini, kemudian di *share* di group Komisi XI DPR RI.

Mari kita syukuri karena ternyata kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena pengaruh perekonomian global kita masih punya semangat memindahkan ibu kota dengan berbagai cara. Ini bukti kalau kita akan tetap survive sebagai negara yang memang maju. Oleh karena itu, singkat saja karena memang bahasan sore hari ini hanya membahas asumsi makro.

Saya pesimis terhadap perkiraan asumsi makro yang diajukan oleh Pemerintah, terutama dan utama mengenai pertumbuhan ekonomi. Walaupun ini kita kalau tidak salah hari ini belum mengambil keputusan ya Pimpinan. Saya hanya memberikan gambaran proyeksi RAPBN tahun 2020, PDB kita tumbuh 5,3% ini menurut saya termasuk ambisius mungkin tidak akan terealisasi. Karena Pemerintah sendiri outlook 2019 hanya 5,2 realisasi dari 2017 juga berkisar 5,07 dan 5,17. Sementara kalau dari chart yang dipaparkan Menteri Keuangan di halaman 7 tadi faktor-faktor yang mempengaruhi PDB ini untuk tahun 2020 tidak ada yang lebih baik untuk kondisi tahun-tahun yang lalu. Mulai dari konsumsi rumah tangga, lembaga non provit, konsumsi Pemerintah, ekspor, impor dan sebagainya tidak ada yang lebih baik dari kondisi 2019. Jadi bagaimana mungkin 2020 kita memproyeksikan pertumbuhan

di atas 2019, bisa jadi malah merosot dari 2019. Dan ini juga sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia tadi di titik tengah antara 5,1 sampai dengan 5,5. Jadi kalau saya mengikuti proyeksi Bank Indonesia hanya 5,25 menuju titik tengah, menuju titik tengah berarti di bawah titik tengah antara 5,1 sampai 5,5%.

Ini yang ingin saya sampaikan, pertama asumsi makro mengenai pertumbuhan ekonomi rasanya 5,3 terlalu tinggi, paling banter 5,2 sama dengan outlook 2019. Bisa jadi nanti realisasi 2019 ini tidak lebih baik dari 2018.

Kalau angka inflasi oke kurang lebih 3,1 memang dan nilai tukar karena pertumbuhan ekonominya memburuk saya yakin nilai tukarnya juga akan lebih buruk. Jadi Rp14.400 saya kira reasonable. Suku bunga mungkin akan sama dengan outlook 2019, karena kondisi perekonomian yang memburuk tentunya suku bunganya tidak akan membaik, kurang lebih demikian.

Sekali lagi Pimpinan, saya ingin menyampaikan angka-angka itu walaupun sore hari ini kita belum mengambil keputusan, tapi proyeksi Pemerintah saya pikir masih terlalu ambisius.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak Sarmuji silakan.

F-PG (M. SARMUJI, S.E.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Ibu dan Bapak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya,
Kepala BPS yang saya hormati.**

Yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita dengar dari paparan Ibu Menteri tadi pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang 2020 diperkirakan sama dengan outlook 2019 sebesar 5,0. Kalau lihat angka seperti ini, itu pada tahun 2020 tentu menyisakan satu pertanyaan, karena pada tahun 2019 konsumsi rumah tangga itu banyak sekali ditopang oleh kebijakan Pemerintah. Misalkan konsumsi untuk kelas menengah bawah itu banyak sekali ditopang oleh adanya Bansos dan belanja Pemilu, artinya pada tahun 2019 sebenarnya kalau tidak ditopang oleh Bansos yang cukup besar dan belanja Pemilu, bisa jadi konsumsi rumah tangga 2019 itu pertumbuhannya mungkin di bawah outlook 5,0.

Di 2020 kebijakan Bansos barangkali akan berkurang dan tidak ada momentum yang sama seperti 2019 tentang Pemilu. Memang masih ada Pilkada serentak tetapi

apakah itu memberikan leverage yang sama untuk menopang konsumsi rumah tangga sebagaimana pada tahun 2019. Saya pikir tidak akan sama karena belanja Bansos di tahun 2019 sangat besar.

Karena itu, yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk menopang agar konsumsi rumah tangga itu tetap 5,0. Itu di sisi kelas menengah ke bawah, di sisi kelas menengah ke atas sebenarnya bisa kita amati konsumsi rumah tangga mengalami stagnan, kalau kita bisa amati property yang di atas harga tertentu itu pertumbuhannya sangat lambat. Orang sudah mulai mengeluh harga property di atas 500 juta dijual sangat lambat dibandingkan dengan property di bawah itu. artinya apa? di kelas menengah ternyata ada problem untuk peningkatan konsumsi rumah tangga. Itu juga apa yang mau dilakukan oleh Pemerintah. Berbagai insentif selama ini rasanya tidak nendang untuk menjaga konsumsi rumah tangga di kelas menengah bisa meningkat, karena itu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

Demikian juga pada sisi ekspor, di asumsikan di sisi ekspor pada tahun 2020 itu tumbuh 3,7%. Padahal sebagaimana tadi dipaparkan ekspor kita terutama pada harga-harga komoditas masih mengalami penurunan. Kalau harga komoditas mengalami penurunan tentu kita tidak bisa mengandaikan pertumbuhan ekspor itu 3,7% kecuali kita yakin benar di luar sektor harga komoditas pertumbuhan ekspor kita meningkat cukup tajam, misalkan apakah ada peningkatan pertumbuhan ekspor di industry pengolahan, industry manufaktur, dan sebagainya. Barangkali ini Pemerintah perlu memberikan penjelasan sebelum kita yakin benar apakah pertumbuhan ekspor bisa sampai 3,7% pada tahun 2020. Itu yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari suku bunga SPN, Pemerintah mengasumsikan menawarkan 5,4% suku bunga SPN pada tahun 2020. Sementara kita melihat asumsi inflasi pada tahun 2020 masih sama dengan outlook tahun 2019, yaitu 3,1%. Kalau melihat inflasi sebagai determinan faktor suku bunga SPN rasanya harus kita lihat faktor-faktor yang lain yang juga berkontribusi pada penetapan suku bunga SPN sebesar 5,4% karena ada penurunan 0,2% dari sebelumnya 5,6%. Kira-kira faktor apa menyebabkan Pemerintah yakin suku bunga SPN kita bisa sampai 5,4%. Apakah suku bunga internasional akan mengalami penurunan menurut prediksi Pemerintah, apakah ada faktor-faktor yang lain yang Pemerintah bisa confert angka 5,4% itu.

Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, ada satu tambahan akan tetapi sebenarnya ini menyangkut sedikit menyenggol postur APBN. Kita mendengarkan paparan dari Pemerintah, defisit kita patok cukup rendah tetapi belanja kita meningkat cukup tajam. Itu artinya apa? artinya akan ada peningkatan penerimaan negara terutama di sektor pajak. Sementara kita belum terlalu yakin ekonomi kita menggeliat cukup baik pada tahun 2020. Barangkali perlu penjelasan juga dari sisi itu.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak Misbakhun.

F-PG (H. MUUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Bapak Ketua Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Yang saya hormati Anggota Komisi XI DPR RI,
Menteri Keuangan beserta jajaran yang saya hormati,
Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran yang saya hormati,
Ketua Dewan Komisiner OJK beserta jajarannya yang saya hormati,
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta jajaran yang saya hormati,
Kepala BPS beserta jajarannya yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi, saya berusaha sedikit rangkum ada 3 hal yang penting. Saya melihat bahwa kalau Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ada ketidak pastian yang terus menerus dan terus berkelanjutan dan ini adalah mungkin menjadi sebuah gejala krisis baru terhadap perekonomian. Dan itu yang membuat Pemerintah menjadi sangat hati-hati sejak awal dalam menyusun proyeksi asumsi makro ini di dalam hal pertumbuhan.

Kemudian di sana terucap kembali adalah membangun *confident* terhadap APBN kita. kemudian di sini saya ingin berusaha menyampaikan wacana mengenai krisis inikan selalu menghantui dan ketidakpastian itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. akhirnya orang-orang terbaik di dalam perekonomian kita adalah tugasnya untuk mengantisipasi bagaimana krisis, bagaimana ketidak pastian itu bisa dikelola. Gejala krisis itu bagaimana dikelola kemudian bukan menjadi krisis yang datang akan tetapi kemudian itu menjadi sebuah kondisi yang harus kita atur strategi menghadapinya.

Membangun *confident* di dalam APBN kita, yang menjadi pertanyaan kita adalah yang selama ini selalu disampaikan oleh Presiden membangun *confident* itu tentunya akan mempunyai dampak terhadap profiling persepsi orang asing atau persepsi siapapun terhadap termasuk pasar terhadap ekonomi kita. Kalau kita perhatikan ternyata kita mendapatkan investment grade dari beberapa lembaga rating, tapi kemudian yang menjadi permasalahan FDI kita menjadi turun dan kemudian negative, FDI turun kemudian membuat current account defisit yang salah satu menjadi penyebab current defisit ternyata ketika Pemerintah menyelesaikan

bukan karena kredit rating kita akan tetapi masalah perijinan, masalahnya ada di perijinan.

Kemudian kalau kita mau membangun *confident* di APBN kita, ternyata surat utang kita itu juga tidak tambah turun tetapi menjadi lebih mahal imbal baliknya. Nah, kemudian *confident* yang kita bangun ini kemudian untuk apa? karena apa? kalau *confident* itu untuk membangun persepsi saja tapi kemudian tidak memberikan sebuah dampak yang secara resiprokal dalam upaya membangun *confident* itu terus kemudian untuk apa ini kita bangun. Karena dalam pandangan saya 1,76 ini adalah sejarah paling rendah di dalam kita menyusun APBN pada saat defisit. 1% saja itu akan menjadi kalau volume total APBN kita 2.528,8 triliun itu asumsi makro Pak. Ini akan kemudian sekitar 250 triliun sendiri atau kalau kita ngomong setengah saja, kita longgarkan sedikit defisit itu akan ada sekitar lebih dari 125 triliun dan itu kalau kemudian menjadi proyek itu tentunya ekspansi APBN itu akan memberikan perbedaan bagi kita semua.

Tadi Bank Indonesia menyampaikan proyeksinya yang proyektif dan memberikan membangun optimisme soal bagaimana mengelola sektor moneterinya. GWM diturunkan, seven days repo rate diturunkan, kemudian apa? sehingga terjadi relaksasi di kemudian sektor moneterinya, kredit kemudian lebih longgar, tinggal nanti bagaimana OJK mengawasinya. Bappenas memberikan optimisme bahwa dengan APBN ini akan menurunkan tingkat kemiskinan, kemudian menurunkan gini ratio, menaikkan kesempatan pekerjaan, IPM Indeks kita akan naik dan kemudian peluang pekerjaan akan naik.

Kemudian kalau kita masih bertahan di 5,3 kemudian ekspansinya tertahan hanya karena kita ingin membangun defisit yang seperti disampaikan, inikan saya ingin tahu manfaat yang utamanya apa. Karena apa? kalau dari sisi investment grade tidak membuat surat utang kita lebih murah, kalau kemudian membuat orang berinvestasi juga bukan karena itu, karena apa? faktornya bukan karena investment grade akan tetapi faktornya adalah masalah perijinan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan mendasar saya.

Kalau upaya itu tidak paralel dengan upaya kita berusaha membuat APBN itu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Sekarang gunanya kita menahan karena apa? ruang yang diberikan oleh Undang-Undang inikan 3%. Nah, kita kalau terlalu rigit dengan kemudian seakan-akan bahwa defisit, defisit itu penting, kan kita masih dikasih ruang bukan kita mau sembrono dengan di atas 3% kan tidak. Nah, inilah yang kalau menurut saya keseimbangan primer, inikan resiko nanti. Kalau kita mau dikatakan utang dan tidak itukan bagaimana kita menjelaskan kepada publik. Karena apa? tekanannya nanti akan menjadi pertanyaan banyak orang adalah seberapa optimal kita dalam penerimaan pajaknya. Nah, ini yang akan menjadi resiko yang lain. Memitigasi resikonya nanti kita bicarakan bersama-sama.

Yang menjadi pertanyaan utama saya itu kenapa kita selalu mengesankan seakan-akan pertumbuhan defisit, bukan pertumbuhan ya, nilai besaran defisit 1,76 sebelumnya 183 dengan realisasinya menjadi naik. Ini adalah upaya membuat kita menjadi lebih *confident* atau *credible*. Padahal kan sebenarnya kalau APBN itu kita umumkan lebih awal dengan ekspansi yang lebih kuat bahwa Pemerintah

membangun, menguatkan pertumbuhan dan sebagainya, 125 triliun atau berapa triliun lebih banyak itu adalah sebuah stimulus yang lain kepada proyek-proyek Pemerintah. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau misalnya menjadi DAK kepada daerah-daerah. DAK-nya mereka menjadi sangat signifikan, misalnya 100 miliar atau 200 miliar, provinsinya di kasih 500 miliar, sehingga ada proyek besar yang di grade di daerah dikerjakan oleh swasta daerah dan ini akan menjadi pertumbuhan tersendiri dan terdistribusi secara regional.

Nah, inikan menjadi sangat penting kita mengalami siklus yang berubah, yang dahulunya daerah mengalami transfer DAK yang sifatnya signifikan 100 miliar, kemudian turun lagi menjadi 20, 30 dan sebagainya yang kemudian mereka harus berpikir ulang membuat proyek yang besar di daerahnya. Nah, ekspansi yang seperti inilah kita harapkan tidak kemudian kita selalu menghitung soal defisit di bawah, kita terjebak dalam pemikiran yang itu stigmatis, seakan-akan semakin kecil defisit itu adalah ideal, bagi sebuah bentuk APBN kita. Itu yang bisa saya sampaikan.

Kemudian mengenai target kemiskinan Pak, gini ratio tadi. gini ratio antara koat dan daerah yang semakin menurun di pedesaan terutama dan kemudian fokus, ternyata gini ratio yang tinggi itu ada diperkotaan. Pertanyaan saya kenapa kemudian APBN 2020 ini tidak dibicarakan lagi soal dana kelurahan Pak. Karena dana kelurahan ini sempat ada di APBN 2019, belum kemarin tidak dibicarakan. Yang ada adalah naik dana desa dari 70 menjadi 73 triliun, kalau tahun lalu 70 dana desa dan 3 triliun dana kelurahan. Tahun ini hanya disebutkan dana desa saja, tanpa menyebutkan dana kelurahannya.

Nah, ini kalau kita lihat itu, karena apa? penetrasi dana desa ini sangat bagus untuk mereduse kesenjangan tadi. Dan ini adalah luar biasa kita mempunyai proyeksi yang dulunya sempat dari 0,4 kemudian turun dan semakin turun 3,8 inikan sebuah prestasi pencapaian yang luar biasa. Ternyata kemiskinan itu lebih banyak diperkotaan, seharusnya nanti kalau dengan adanya dana kelurahan ini saya harapkan ini akan menjadi stimulus yang berbeda menahan jangan sampai laju kesenjangan itu ada diperkotaan. Karena apa? perkotaan ini adalah dana yang sangat rawan sosial maupun politiknya.

Nah, ini saya ingin mendengar bahwa kalau memang itu dana kelurahan ini kenapa sekarang menjadi tidak terdengar. Dan ini adalah sebuah proyeksi kalau menurut saya itu menarik untuk dibicarakan ulang dan menjadi tawaran solusi untuk sebagian mereduce untuk mengatasi kesenjangan itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak Jon Erizal.

F-PAN (H. JON ERIZAL, M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan teman-teman Komisi XI DPR RI, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Kepala BPS, Ibu Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK Bapak Wimboh selamat Pak telah menjadi guru besar, sehingga nanti OJK bisa lebih besar, serta teman-teman yang mendampingi.

Dari paparan tadi saya mencatat tidak banyak hari ini. Saya melihat pertumbuhan 5,3 itu masih moderat, namun yang saya konsen itu adalah belanja Pemerintah. Ini bagaimana caranya nanti Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan mengendalikan atau mengontrol belanja-belanja di KL-KL, apakah itu betul-betul itu produktif atau tidak produktif, itu yang penting ukurannya. Dan kami kalau bisa mendapat jawaban yang lebih konkrit tentang itu, karena ada program-program strategis apa di setiap kementerian. Nanti jangan sampai rencana seperti ini di belanjakan dengan hal-hal mungkin produktif tetapi tidak maksimal. Itu satu.

Yang kedua, kaitan dengan suku bunga SPN 3 bulan ini disampaikan untuk 2020 5,4. Saya melihat dengan kondisi tadi yang disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa suku bunga repo Bank Indonesia telah turun dari 5,75 jadi 5,5 kemudian ini tentunya kabar gembira di sektor riil dan mudah-mudahan sesuai apa yang sering kami sampaikan juga di banyak kesempatan, ini sangat perlu diturunkan supaya betul-betul sektor riil bisa maksimal bergerak.

Nah, satu sisi repo rate Bank Indonesia ini turun. Kemudian juga saya ingin menyampaikan pada Bank Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tadi GWM, tadi terima kasih sudah diturunkan. Ini juga ada slot kalau tidak salah satu bank papan atas kita itu juga dengan diturunkan GWM itu ada slot direalokasikan ke sektor riil 16 triliun hanya satu bank. Itu saya dapat informasinya seperti itu.

Saya melihat ada satu lagi potensi besar, karena dari 6% GWM diturunkan itu 2,5% kan ditempatkan di giro Bank Indonesia, di rekening Bank Indonesia. Ada 3,5% lagi yang dipersyaratkan melalui surat utang negara. Menurut saya kalau 3,5% ini dibebaskan kepada bank-bank pelaksana untuk mengalokasikan sesuai dengan rencana kerja mereka ini yang akan lebih maksimal lagi aktifitas sektor riil.

Jadi mohon juga nanti Bapak Wimboh ini juga menjadi perhatian agar jangan itu terfokus saja di surat utang negara. Kalau surat utang negara tentu peminatnya banyak dan aman apalagi kita lihat beberapa hari yang lalu adanya *inverted curve* itu dimana arah jangka pendek itu minat investor lebih besar dan ini kita 3 bulan 5,4 kan saya yakin minatnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wimboh tadi akan meningkat. Jadi menurut saya ini mungkin perlu dikoreksi, tidak 5,4 tapi kalau perkiraan saya itu di 5,2. Jadi kita lebih yakin lagi bahwa ke depan itu bahwa keyakinan para investor terhadap Indonesia itu lebih maksimal.

Kemudian tadi menarik apa yang disampaikan oleh Kepala BPS, yaitu kaitan dengan ekspor tadi, karena salah satu pendokrak juga pertumbuhan itu adalah ekspor

kita, yaitu yang berkaitan dengan pengolahan. Inikan problem yang tidak pernah teratas dari dulu, kita berharap dulu Freeport agar bisa membuat produk-produk lebih ke *down stream* tapi sampai saat ini juga tidak terlaksana. Padahal kalau itu terjadi luar biasa sudah peningkatan ekspor kita.

Nah, kemudian yang lain-lain juga kita lihat. Tadi disebutkan karet, sawit juga, kita lihat sawit ada di mana-mana, tapi pemain baru yang mau masuk itu tidak akan pernah bisa masuk, karena apa? karena segmen pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja. Ini juga saya ingin mengingatkan agar Pemerintah juga membagi segemn-segmen tersebut, kalau dibiarkan di pasar pasti yang raja-raja lama itu tidak akan tergeser. Nah, ini penting sekali agar ekspor ini juga pemainnya juga semakin banyak semakin melebar.

Kemudian tadi disinggung juga tentang bursa saham oleh Bapak Wimboh dimana kita bersyukur IHSG itu sudah di atas 6000, tapi kalau yang saya amati kalau IHSG naik itu duitnya kan masuk kepada pemain-pemain yang sudah ada, tidak terdistribusi kepada *the new comer*. Harapan kita bursa saham ini yang datang masuk banyak itu adalah *new comer*, jadi yang IPO itu semakin hari semakin banyak sehingga ter-*spreading* sumber-sumber dana murah kepada perusahaan-perusahaan yang memang baru muncul. Jadi kalau ukuran kita hanya IHSG yang ada saja, yang kita hitung di atas 6000 sekarang itu yang menerima adalah orang-orang pemegang saham yang sudah ada, juga tidak terdistribusi ke banyak pemain yang baru. Oleh karena itu, tentu kita berharap lebih lagi menggalakkan bagaimana mekanisme agar setiap perusahaan yang ingin IPO itu lebih mudah dan lebih diberikan kesempatan besar.

Sementara itu saja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, yang berikutnya Bapak Johnny G. Plate.

F-PG (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat, Bapak Menteri, Ibu Menteri, Kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan seluruh Wakil Menteri dan seluruh jajaran Pemerintah yang kami hormati.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Mohon maaf tadi kita tidak bisa ikut secara menyeluruh karena ada interval rapat yang lain.

Bapak Ketua, saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan APBN aau RAPBN 2020 adalah pembahasan RAPBN terakhir dari DPR RI periode ini. Kalau kita

mereview kembali apa yang sudah kita lakukan di dalam pembahasan asumsi makro terkait dengan APBN, maka dulu Komisi ini juga yang mengintrodusir untuk adanya tidak saja asumsi makro ekonomi, postur APBN tapi juga target pembangunan.

Dan saya kira dari belanja-belanja negara selama ini juga terlihat bagaimana capaian-capaian dari target-target pembangunan itu. Nah, untuk itu saya tentu sangat menyarankan agar rapat kita tidak saja terkait dengan asumsi makro tapi juga membicarakan target pembangunan dan postur APBN-nya sekalian, khususnya target pembangunan. Itu yang pertama ingin saya sampaikan.

Yang kedua, saya membaca dan mendengar tadi secara sepintas apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, APBN kita ini optimistis akan tetapi dengan penuh kehati-hatian. Memang ini sangat optimis APBN ini, tidak saja asumsi makronya, target pembangunannya tapi juga postur sangat optimis. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal disini terkait dengan itu, bahwa faktor global yang tadi sangat mempengaruhi dan cenderung kita di awal atau berpotensi resesi tapi juga ada faktor global lainnya yang perlu menjadi perhatian yang barangkali bisa bermanfaat untuk kita seperti misalnya selain *trade war*, *Brexit*, juga terjadi masalah di Hongkong. Masalah Hongkong ini bisa saja berimplikasi *capital outflow* dari Hongkong dan bisa menjadi *capital inflow* justru ke Indonesia, setidaknya ke Asian.

Saya beberapa waktu yang lalu baru ke Singapura, menginap di Singapura coba perpanjang kamar semalam tidak bisa katanya, "I'am sorry sir, cannot", katanya, "why cannot? ", "fully book" katanya. Dari mana fully book-nya, "why fully book, you gentleman please help Indonesia", "cannot sir" katanya. Dari mana mereka? "Hongkong", katanya. Hotel-hotel Singapura penuh Hongkong akibat dari demonstrasi dan sebagainya yang di Hongkong sangat mempengaruhi psikologi pasar dan investasi. Dan mereka perginya kemana? Ke Asian, termasuk pintu gerbangnya melalui Singapura. Ini tidak tertutup kemungkinan dia berimplikasi kepada capital inflow ke Indonesia juga, karena tidak saja hal-hal faktor global itu yang memberatkan tapi ada juga *opportunity* yang harus kita antisipasi dengan baik. Itu yang kedua barangkali.

Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan disini Ibu Menteri. Kalau dilihat dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2019 itu 5,2. Saya masih ingat ini pada saat pembahasan RAPBN dulu tahun 2019, kami mengingatkan bahwa maksimum 2 bahkan bisa di bawah 2, tapi dengan penuh semangat kita semua waktu itu tetapkan kesepakatan kita terkait dengan *growth*. Demikian sekarang dengan semua tantangan-tantangan itu di samping harapan dari Hongkong tadi supaya kita menyusun asumsi makro kita ke yang lebih realistis sedikit. Pemilu sudah selesai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selain sama-sama kita bekerja untuk kepentingan negara. Untuk itu, maka kita perlu berani untuk menetapkan asumsi-asumsi yang lebih realistis nantinya.

Yang kedua, kami ingin mengingatkan juga bahwa tantangan-tantangan dunia ini akan berimplikasi ke dalam negeri khususnya kepada daya beli, maka Pemerintah dan Bank Indonesia agar betul-betul memprihatinkan dan menjaga agar tingkat inflasi yang kita rencanakan ini betul-betul bisa kita kawal bersama-sama, ini terkait dengan daya beli masyarakat yang harus kita perhatikan itu betul-betul.

Saya juga ingin menggarisbawahi sedikit terkait dengan neraca perdagangan yang masih defisit. Hilirisasi produk-produk hasil SDA kita itu harus menjadi perhatian dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan serius. Dan hilirisasi ini bukan lagi pilihan akan tetapi ini menjadi kewajiban untuk dilakukan, karena penyederhanaan-penyederhanaan dan memudahkan seluruh proses perijinan dan investasi itu perlu didukung dan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, termasuk secara afirmatif misalnya untuk substitusi bio diesel. B30 itu harus dilaksanakan secara serius, apalagi sekarang bukan saja bio diesel, bio aftur pun dibutuhkan besar dan konsumsi bio aftur itu sangat tinggi, karena populasi pesawat terbang di Indonesia sangat besar.

Nah, dalam rangka kebetulan salah satu komponen besar daripada defisit neraca perdagangan kita di luar sektor impor migas, maka hal-hal ini harus menjadi keputusan-keputusan afirmatif yang harus kita lakukan dengan penuh keberanian. Jangan sampai kita *short side* hanya melihat fluktuasi harga ...(suara tidak jelas) terkait dengan minyak mentah yang naik turun. Pada saat harga minyaknya tinggi, kita bilang cocok ini bio diesel, pada saat harga minyaknya turun tidak cocok ini bio diesel. Repot kita kalau begitu, kita punya perspektif yang jangka panjang dalam rangka perlindungan konsumsi dalam negeri dan produksi kita dalam negeri sendiri. Apalagi bio diesel kalau itu dari CPO misalnya itu juga melindungi jutaan petani kita dan jutaan hektar lahan-lahan yang sudah menjadi tanaman pertanian sawit kita.

Saya kira secara umum itu yang bisa kita sampaikan untuk bisa menjadi perhatian Pemerintah. Sekaligus kami melihat asumsi makro ini optimistik dengan penuh kehati-hatian, kehati-hatiannya nanti kita tentukan bagaimana, tetapi kita juga ingin sekaligus membicarakan terkait dengan target-target pembangunan, karena masyarakat menunggu dengan penuh harapan.

Sebelum saya akhiri Bapak Ketua, ingin saya ingatkan kepada Pemerintah ini informasi dari daerah pemilihan juga. Ini terkait dengan tugas-tugas land bank, pada saat Pemerintah secara agresif melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan yang terkait dengan kebutuhan lahan yang kita semuanya dukung dan itu baik, maka perlu tata kelola land bank dengan lebih baik lagi.

Tadi kita baru ketemu dengan LMAN, tapi perlu kita ingatkan Ibu Menteri Keuangan bahwa banyak sekali ketidak pastian terhadap kepemilikan lahan masyarakat yang terkait dengan pembangunan fisik, baik itu pembangunan jalan, jembatan, bandara dan lain sebagainya. LMAN menyampaikan tadi yang land bank yang mereka lakukan itu 5 bagiannya, termasuk di dalamnya bendungan, irigasi, dan jalan tol. Betul jalan tol penting tapi jalan-jalan negara yang menjadi persoalan di daerah, rakyat ini tidak tahu harus mengadu kemana. Jangankan ganti untung disebutkan untuk ganti untung, ganti rugi pun tidak, bahkan bisa saja itu rakyat dalam tekanan di mana kepemilikan lahannya dirampas oleh negara. Yang terjadi di masyarakat adalah seluruh aparat bekerjasama dengan alasan pembangunan yang strategis, maka rakyat harus menyerahkan lahannya dan itu disetujui, dan dihadiri oleh seluruh aparat, rakyat dalam hal ini tidak berdaya secara terpaksa menyerahkan lahan-lahan mereka. Saya kira bukan itu tujuannya, kan sudah ada LMAN untuk membantu itu dan menyelesaikan itu dengan baik.

Nah, ini terjadi di masyarakat apalagi kepemilikan lahan masyarakat yang terjadi ini apa? kalau bersertifikat transaksinya bisa tinggi, kalau tidak bersertifikat menjadi pertanyaan dibayar atau tidak? Rakyat tanya kepada kami. Yang keluar sertifikat siapa? Pemerintah katanya. Kenapa Pemerintah tidak keluar sertifikat kami. Lalu kegagalan Pemerintah menerbitkan sertifikat kami dirugikan karena dengan tanah kami dirampas oleh negara.

Di saat yang sama Bapak Presiden begitu gencarnya dan secara sungguh-sungguh melakukan sertifikasi lahan masyarakat. Dan kita memberikan apresiasi luar biasa sekali, belum pernah terjadi dalam sejarah republik ini di mana sertifikasi lahan masyarakat itu dilakukan secara massif, tetapi perlu diimbangi juga di mana khususnya terkait dengan land dan ini untuk diperhatikan secara serius. Jangan sampai rakyat diberikan rasa takut, lalu mereka kehilangan haknya. Percuma seluruh usaha pembangunan kita kalau mereka di dalam tekanan.

Yang kedua adalah seluruh program sosial kita bagus sekali dan selalu besar dan menjadi besar setiap tahunnya, akan tetapi pendataan sebagaimana yang selalu disampaikan masih perlu penyesuaian agar lebih akurat, sehingga pada saat itu diimplementasikan harapan Presiden agar APBN itu fokus dan tepat sasaran termasuk perlindungan sosial yang fokus dan tepat sasaran bisa dicapai bersama-sama.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Silakan Ibu Eva.

F-PDIP (EVA KUSUMA SUNDARI):

Terima kasih.

Untuk usulan asumsi makro saya tidak akan merespon tapi saya ingin bicara tentang strategi dan juga tentang manajemen operasionalisasi. Saya mempunyai data yang ini terkait dengan target pembangunan yang tadi disampaikan oleh Bappenas, tapi kemudian mendapat semacam dukungan dari BPS.

Menurut saya dalam hal ini apapun yang dikatakan oleh Bappenas ini saya maknai sebagai yang paling penting dalam pembangunan manusia ya ini. Dan bagaimana sebetulnya penentuan tentang asumsi makro tadi memfasilitasi pencapaian tujuan nasional kita berupa IPM yang naik, singkatnya seperti ini. Saya cukup khawatir kalau kemudian target-target yang dibuat oleh RAPBN 2020 ini sangat rendah, misalkan tingkat kemiskinan turunnya rendah, gini ratio juga sangat rendah dan seterusnya. Dan inikan sebetulnya wajah dari tujuan pembangunan nasional itu disini, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu aspek ini yang saya ingin tekankan. Dan saya mempunyai data, saya nebang di SDG's saja ya, capaian-capaian SDG's kita itu yang memang ada interseptionnya dengan keadilan ataupun

pemerataan ini. Dan kita dikategorikan sebagai suatu negara dalam G-20 oleh SDSN 2018, yaitu yang terakhir adalah dalam kategori negara yang paling lambat pencapaiannya SDG's nya. Jadi agak khawatir nanti target 20-30 itu nanti rendah.

Nah, sementara kita tahu bahwa dari 17 target SDG's itu kuat sekali soal tentang *gender approach*-nya harus kuat untuk menjamin agar *property, zero hunger, good health, and well being*-nya itu dimensinya sangat *gender responsive* bahkan sensitive dan seterusnya. Sementara data yang kita lihat gender gap indeks kita memburuk Pak, jadi di kita itu di Asean, kalau kita sudah baguslah dari perspektif waktu ke waktu sudah ada perbaikan. Tapi kalau dibandingkan dengan negara Asean, kita ini pada posisi 102 dari pencapaiannya. Jadi kalau dibandingkan Thailand yang pada ranking 40 untuk capaian SDG's nya, Vietnam 54 dan Singapura 66. Dan untuk *gender gap* kita, kita ini pada ranking ke-6 dari 10 negara Asean. Jadi kok menurut saya, kita ngomong pembangunan dan tujuan nasionalnya itu hanya sangat reduksionis, sangat kecil sekali. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional berupa keadilan sosial, kayaknya harus mendapat porsi yang agak serius dari hal diskusi ini.

Jadi sebetulnya yang kalau mau kita mengoperasionisasinya ya pelaksanaan dalam bugeting itu sendiri yang dulu saya sudah menyoal dan Bapak Bambang juga menjanjikan okelah untuk agar PUG (Pengutus Utamaan Gender) bisa bagus termasuk juga nanti di dalam anggaran resposif gender itu kita mesti buat *checklist* atau panduan kalau memang tidak bisa dibuat technical asisten. Dan evaluasi dari Komnas Perempuan mengkonfirmasi ini tidak jalan walaupun sudah menjadi pendekatan di dalam gender mainstreaming, untuk mainstreamingnya sudah dipasang sejak tahun 2000, tapi kalau kita melihat gender gap indeks kita semakin melebar, artinya kan tidak jalan, instrumentnya tidak sesuai dengan dalam pendekatan di awalnya.

Jadi kalau ingin kita keadilan sosialnya semakin kita kuatkan, maka harus dicari terobosan. Dan tadi saya nebang di SDG's sebetulnya, karena menurut saya yang paling jelas untuk technicalities, tentang pencapaiannya dan seterusnya adalah dengan menggunakan *loch frame* atau *frame work* dari SDG's itu sendiri.

Nah, ini saya juga menyoro dari Bank Indonesia. Ternyata apa yang dinamakan bahwa kenapa kok kita lambat, karena tidak mampu menginklusi sektor perbankan dan seterusnya, karena kebijakan perbankan kita melalui *blended financial policy*-nya tidak bisa memberikan insentive kepada perbankan agar mau terlibat di dalam pendanaan SDG's. Jadi mungkin ini yang perlu dipikirkan secara serius, sehingga tujuan pembangunan nasional kita semakin bisa didekati dan dikontribusi ini oleh, baik riil maupun perbankan secara bersama-sama.

Jadi tadi sudah diingatkan oleh BPS dan menguatkan sinyalemen saya bahwa perkawinan dini yang dampaknya kepada stunting dan juga angka kematian ibu bayi harus mendapatkan porsi yang lebih serius untuk didalami. Jadi ini konsen saya Pak, jadi tidak merespon hal-hal yang sifatnya terpisah-pisah akan tetapi kepada strategi umum bahwa ada ancaman kalau kita *doing business* pada level yang sekarang, SDG's kita lemah dan tujuan nasional kita, pembangunan kita, *growth* kita memang

naik, tapi kemudian ternyata aspek-aspek untuk pemerataannya menjadi lamban untuk dicapai.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Eva.

Bapak Ara.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Teman-teman Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Bappenas, Kepala BPS, dan Ketua OJK
dan juga Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang saya hormati.**

Selamat sore,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya sudah cukup sering membahas soal asumsi makro ini, mungkin beberapa fakta-fakta yang saya mau sampaikan. Juga buat BPS yang pertama mungkin saya berharap BPS itu bisa lebih credible lagi menjadi ukuran-ukuran bagi kita untuk mengevaluasi kinerja sebuah Pemerintahan, siapapun Pemerintahan itu. Jadi lebih cepat dan saya pikir ke depan harus betul-betul menempatkan posisi itu, bahkan saya dulu sempat berpikir bagaimana BPS itu menjadi suatu yang lebih independent sehingga tidak ada apakah ketakutan atau apapun untuk menyampaikan yang benar. Sampai kesitu level pemahaman saya, sehingga tidak ada debat lagi sebuah Pemerintah itu kemiskinan itu bertambah atau berkurang, gini rasionya bertambah atau berkurang.

Saya pikir perlu dipikirkan lagi BPS ke depan sehingga debat tentang berhasil atau tidaknya mengentaskan kemiskinan ke depan kita memiliki lembaga. Walaupun dia bagian dari Pemerintah tetapi bagaimana apa yang disampaikan itu tidak diperdebatkan, baik secara metodologi maupun tidak diintervensi oleh siapa pun. Menurut saya itu sangat penting standing posisi itu.

Yang kedua, saya juga mau mengapresiasi Ibu Destry dan jajaran Gubernur Bank Indonesia. Saya melihat Bank Indonesia dalam beberapa waktu ini sudah *over capacity* banyak melakukan hal-hal yang saya dengar di *market*, karena kebetulan saya juga di Kadin, saya aktif juga di teman-teman HIPMI banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang juga bisa menggerakkan ekonomi. Saya juga termasuk pengkritik pada saat misalnya suku bunga beberapa tahun lalu itu tidak diturunkan pada saat ekonomi kita sangat membutuhkan, tapi saya juga harus memberikan apresiasi.

Jadi bagaimana Bank Indonesia tidak boleh jauh jadi Menara gading yang jauh dari realita ekonomi dan sosial masyarakat. Saya melihat di bawah Bapak Ferry dan Ibu Destry sudah mulai membumi dan saya mohon itu bisa diteruskan, karena itu saya dengar sendiri dari berbaagi masukany positif tolong itu diteruskan. Dan perbanyak dialog dengan kalangan industry, kalangan pengusaha dari bawah, menengah dan atas, saya pikir itu bagus.

Saya juga harus sampaikan apresiasi dengan Bapak Wimboh, saya tahu Bapak Wimboh juga tidak mudah membereskan apa yang ada di OJK, tapi tantangannya juga dari apa yang sudah ada dan masalah yang ada juga tidak mudah. Dan saya tahu Bapak ya maju saja terus, memang membereskan sesuatu tidak mudah tentu perlu mental yang kuat dan juga perlu staf yang dipilih yang betul-betul profesional dan loyal dengan agenda yang Ketua OJK sampaikan. Saya pikir itu sudah sangat baik.

Saya memberikan catatan Ibu Menteri Keuangan, paling tidak saya mulai dengan yang saya pahami tidak ada visi, misi Menteri, yang ada adalah visi, misi Presiden. Kemudian yang saya pahami juga Presiden kita adalah Presiden yang optimis, Presiden yang selalu ingin negara ini maju walaupun berhadapan dengan pesimistis dari berbagai kalangan yang ada. Tapi tentunya dari jajaran Pemerintah harus mengikuti visi, misi dan optimisme Presiden tadi.

Saya menyampaikan data yang kita tahu ratio utang di beberapa negara, apakah Amerika, Jepang, kalau kita bandingkan Singapura, Malaysia itu jauh dibandingkan kita. Kita masih mungkin sekitar masih rendah dibandingkan itu, memang banyak pengkritik kepada Bapak Jokowi dan Pemerintahan, karena utangnya besar dan sebagainya, tapi menurut saya itu mudah dipatahkan, karena dibandingkan PDB masih sangat rendah dan juga digunakan untuk keperluan yang benar.

Jadi saya rasa kita cukup punya kemampuan untuk meng-*counter* opini-opini yang negative bahwa pengelolaan utang oleh negara itu dan digunakan dengan tidak benar. Saya pikir itu bisa dipatahkan dengan cara membandingkan negara-negara lain dan juga digunakan selama ini untuk hal-hal yang positif, infrastruktur dan lain sebagainya.

Landasan tadi posisi tadi saya perlu sampaikan visi, misi, dan juga optimisme daripada Presiden yang harusnya juga tampak dari apa yang disampaikan oleh Menteri-menterinya. Kalau kita melihat misalnya pertumbuhan ekonomi kita, Bapak Jokowi betul menjanjikan 7% dan baru mencapai 5%. Dan kalau kita lihat beberapa tahun ini, saya harus menyampaikan apa adanya. APBN belum menjadi instrument untuk membuat ekspansi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, itu fakta.

Kita bicara di forum yang terhormat ini dan saya meminta betul bagaimana APBN harusnya bisa menjadi instrument kalau kita bicara *compare* dengan data antara apa yang kita bahas, kita cek saja berapa tahun ini tidak mencapai pertumbuhan itu.

Jadi saya berharap tahun ini tahun 2014 Bapak Jokowi melakukan dua langkah terobosan waktu itu dengan Menteri Keuangannya Bapak Bambang Brodjo saya

sangat menghargai sekali ada tax amnesty yang pertama dan dinilai cukup berhasil. Saya mengusulkan sebagai Anggota DPR RI dibuat tax amnesty yang kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Pro dan kontra pasti ada, dulu juga terjadi pro dan kontra yang luar biasa. Tetapi alasan saya apa? kita bilang negara lain juga ada yang 2, 3 kali. Kemudian kemarin, kalau kita catat evaluasi harus ada konsistensi. Jangan diberikan kemarin waktu sosialisasi, termasuk Bapak Presiden yang saya hadir di beberapa tempat, diberikan jaminan-jaminan akan tetapi jangan sudah ikut dikejar-kejar. Harus diberikan rasa aman juga dan kepastian hukum.

Jadi saya minta itu dipertimbangkan untuk dibuat tax amnesty kedua, supaya apa? supaya masuk ke dalam sistem semua. Kemarin juga dari diskusi dengan berbagai kalangan masih banyak yang ragu-ragu dan belum mengikuti itu. Kita bicara asumsi makro itu juga bicara langkah-langkah besar apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah ke depan. Pemerintah sudah cukup banyak mempersiapkan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Pertanahan, saya pikir tax amnesty kedua membuat Indonesia, yang seperti disampaikan oleh Presiden di tengah perang dagang ini jangan jadi penonton. Kita lihat berapa banyak sih investasi yang masuk ke kita, masih kecil sekali, berarti ada salah dan harus kita diperbaiki, apakah Undang-Undang Tenaga Kerjanya, apakah Undang-Undang Pertanahan ataukah sistem perpajakan kita, ataukah kita kurang memberikan insentif kepada investor dari luar.

Kemampuan untuk intropeksi menurut saya harus kita lakukan hari-hari ini, karena kalau kita bicara output ternyata yang keluar misalnya dari berapa negara besar di dunia ini larinya ke Vietnam, Thailand, seperti rata-rata yang kita tahu semua. Berapa persen yang masuk ke Indonesia. Menurut saya ini juga harus menjadi koreksi bagi kita bagaimana dari data-data yang disampaikan tadi bisa saya pertanggungjawabkan apa adanya.

Kemudian tadi saya menggarisbawahi defisit kita tolong dikoreksi nanti tahun 2019 itu sekarang masih berjalan, waktu dibuat asumsi makronya 1,83 mungkin akan terjadi 1,9. Kemudian defisit sekarang ini 2020 ini 1,76 masih jauh dari angka 3%. Menurut saya, kalau yang kita lakukan sekarang tadi teman saya Bung Johnny Plate sudah menyampaikan optimis. Menurut saya kita harus lebih optimis lagi, harus lebih cepat lagi. Menurut saya ini bisa dilakukan paling tidak sampai angka 2%, sehingga kita punya optimisme, apalagi melakukan langkah-langkah besar soal pemindahan ibu kota dan sebagainya. Saya belum melihat ada spirit itu diturunkan ke asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2020 ini.

Menurut saya itu harus dilakukan dengan signifikan, ada langkah-langkah raksasa, ada langkah-langkah besar yang juga terukur menjelang memasuki Pemerintahan baru yang satu bulan lagi atau dua bulan lagi akan dilantik. Nah, jangan sampai kita kehilangan momentum. Saya mencatat ada dua hal besar yang dilakukan oleh Bapak Jokowi tahun 2014, yang pertama adalah pencabutan subsidi untuk BBM dan dijadikan infrastruktur. Pro kontranya tinggi luar biasa, tetapi bisa dijalankan dan dengan membangun infrastruktur paling tidak sebagian sebagian besar yang kontra itu bisa terjawab. Yang kedua, dilakukan tax amnesty yang selama ini hanya menjadi wacana dan baru dilaksanakan tahun 2016 kalau tidak salah atau 2015 dan itu bisa dijalankan.

Saya berharap Pemerintah di level pembantu Presiden harus bisa mewarnai dengan langkah-langkah yang signifikan. Saya belum melihat disini ada suatu hal yang berubah secara mendasar dan drastis. Dulu Bambang Brodjo juga banyak menghadapi tekanan di publik, dibilang begini dan begitu akan tetapi saya harus respect dengan apa yang anda lakukan dan ternyata terbukti.

Saya pikir Bapak Ketua yang saya hormati, kita juga harus mendorong Pemerintah ini bisa melakukan langkah-langkah yang besar kurang lebih seperti tahun 2014. Jangan sampai kita kehilangan momentum, biasa sesudah Pilpres selesai tentu harapan tinggi, harapan itu tinggal 2, menjadi kekecewaan atau menjadi dukungan publik yang luar biasa tentu kita berharap yang kedua membangun optimisme yang luar biasa.

Saya usulkan ada tax amnesty yang kedua dan juga bagaimana defisit ini, kalau untuk jelas bisa dipertanggungjawabkan buat kepentingan negara, infrastruktur dan lain sebagainya menurut saya terlalu konservatif. Masih banyak ruang fiskal yang harusnya dibuat untuk mendorong supaya benar-benar APBN bisa menjadi pendorong supaya pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat datanya mohon maaf berapa tahun ini APBN belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Buktinya apa? Pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

Mohon ini dikoreksi secara signifikan supaya pada saat kita menyetujui juga ada perubahan-perubahan yang mendasar sehingga baik untuk Republik yang kita cintai ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Pada sore hari ini kita tidak mengambil keputusan, kita mengambil keputusan besok siang setelah Paripurna jam 14.00 WIB. Jadi kami minta kepada Pemerintah untuk menyiapkan jawabannya dan besok dengan jawabannya kita ambil keputusan.

Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kalau gitu rapat saya tutup.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, mohon ijin maaf Pimpinan, saya menyampaikan sedikit saja Pimpinan.

Ibu Menteri, Bapak Bambang, Bapak Wimboh, Ibu Destry dan Bapak Kecuk.

Saya ingin menyampaikan saja satu kondisi di mana tadi kalau dibilang angka kemiskinan secara nasional kan sudah single digit. Tapi khusus untuk Papua dan

Papua Barat, meskipun kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Papua juga sudah cukup baik dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan, sampai saat ini masih mencapai 20%. Jadi mohon diperhatikan kira-kira apa yang salah. Lakukan mungkin secara khusus audit kinerja dan audit terhadap Pemerintah Daerah, apa kira-kira yang salah sehingga kebijakan ekonomi yang dilakukan di pusat tidak sampai bisa diterapkan di daerah.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan demikian Rapat diskors sampai besok jam 14.00 WIB setelah Paripurna.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL ... WIB)

Jakarta, 28 Agustus 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**